

Masa Depan Partai Politik Islam di Kota Medan (Dinamika Koalisi Dalam Pilkada Medan 2024)

Murtheza Muthahhari Tanjung^{1*} Abu Sahrin¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received: 16-08-2024

Accepted: 20-12-2024

Published: 31-12-2024

Keyword:

Cycle of Democratic;

Local Democracy;

Islamic Political Parties;

Political Recruitment

Crisis; Voter

Participation

Abstract: Low voter participation and the shifting strategic role of Islamic political parties in the Medan mayoral election reflect structural problems within local democracy. This study analyzes how coalition pragmatism and a political recruitment crisis create a cycle that systematically erodes public trust. Employing a qualitative methodology with a case study approach in Medan City, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal a "Cycle of Democratic Erosion," wherein the dominance of pragmatic politics and oligarchy triggers a recruitment crisis, resulting in transactional coalitions and low-quality candidates, which in turn foster public apathy. The main finding is that paradoxically, low voter turnout reinforces the elite status quo by reducing accountability, thereby perpetuating this cycle. Improving local democracy requires comprehensive rather than partial interventions, with fundamental reforms in party internal recruitment systems identified as critical steps to break the cycle, improve candidate quality, and restore public trust in the democratic process.

Kata kunci:

Partisipasi Pemilihan;

Demokrasi Lokal; Partai

Politik Islam; Siklus Erosi

Demokrasi; Krisis

Perekrutan Politik.

Abstrak: Rendahnya partisipasi pemilih dan pergeseran peran strategis partai politik Islam dalam Pemilihan Walikota Medan mencerminkan masalah struktural dalam demokrasi lokal. Penelitian menganalisis bagaimana pragmatisme koalisi dan krisis perekrutan politik menciptakan siklus yang secara sistematis mengikis kepercayaan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kota Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya "Siklus Erosi Demokrasi" di mana dominasi politik pragmatis dan oligarki memicu krisis perekrutan, menghasilkan koalisi transaksional dan kandidat berkualitas rendah, yang kemudian menumbuhkan sikap apatis publik. Temuan utama adalah jumlah pemilih yang rendah secara paradoks memperkuat status quo elit dengan mengurangi akuntabilitas, sehingga melanggengkan siklus tersebut. Perbaikan demokrasi lokal juga memerlukan intervensi komprehensif, bukan parsial, dengan reformasi mendasar pada sistem rekrutmen internal partai sebagai langkah kritis untuk memutus siklus, meningkatkan kualitas kandidat, dan memulihkan kepercayaan publik dalam proses demokrasi.

© 2024 Authors

Under The License [CC-BY SA 4.0](#)

Corresponding Author: ✉ murtheza0404211010@uinsu.ac.id

<https://doi.org/10.47766/almabhats.v9i2.6710>



PENDAHULUAN

Pemilu lokal (Pilkada) merupakan arena penting bagi partai politik untuk menegaskan kehadirannya di tingkat lokal, dan partai-partai berbasis Islam tidak terkecuali. Di Medan, kota yang ditandai dengan heterogenitas sosial yang tinggi, partai-partai ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam Pemilu 2024. Tantangan utama adalah pergeseran lanskap politik menuju pragmatisme ekstrem, di mana loyalitas pemilih semakin berorientasi pada daya tarik pribadi kandidat daripada ideologi partai (Ekowati, 2019). Fenomena tersebut memaksa partai-partai Islam untuk menavigasi dilema antara mempertahankan identitas ideologis mereka dan membentuk koalisi pragmatis untuk mengamankan kemenangan. Situasi ini semakin rumit oleh dinamika politik identitas pasca-reformasi yang terus-menerus, yang dapat berfungsi sebagai aset dan kewajiban bagi partai-partai Islam dalam membangun aliansi politik yang solid dan efektif (Erinaldi, 2024).

Keterkaitan antara strategi koalisi, pragmatisme politik, dan keberadaan partai Islam menjadi inti dari permasalahan dalam kontestasi wali kota Medan. Strategi koalisi antara partai politik lokal dan nasional sering kali berfungsi sebagai solusi rasional untuk memenuhi ambang batas nominasi dan memobilisasi sumber daya (Gunawan et al., 2020). Namun, implikasi dari koalisi yang terlalu cair adalah mengaburkannya platform ideologis partai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik lokal jika kandidat yang didukung terpilih (Holilah & Khaq, 2024). Dengan demikian, keputusan untuk membentuk koalisi bukan lagi sekadar manuver taktis untuk kemenangan, tetapi pertarungan strategis yang akan menentukan relevansi dan masa depan politik Islam di tengah lanskap politik yang semakin transaksional.

Dinamika tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Pilihan Rasional dalam ilmu politik. Teori ini mengemukakan bahwa pelaku politik, termasuk partai, akan bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingannya, yaitu kemenangan elektoral. Dalam konteks Pilkada Medan, pembentukan koalisi besar lintas ideologi merupakan pilihan rasional untuk mengamankan probabilitas menang yang lebih tinggi (Efriza et al., 2024).

Keputusan situasional tersebut mengesampingkan platform ideologis demi kalkulus elektoral yang lebih pasti. Fenomena ini juga diperkuat oleh cengkeraman oligarki dan elit politik yang mempengaruhi proses pencalonan di tingkat lokal, di mana keputusan strategis lebih ditentukan oleh segelintir elit

daripada aspirasi kader partai atau basis akar rumput ([Adhianugrah & Zainul, 2023](#)).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Melakukan analisis mendalam terhadap dinamika dan model koalisi yang dibangun oleh partai politik Islam dalam menghadapi Pemilihan Wali Kota Medan 2024. 2) Mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang mendorong pilihan strategi koalisi, baik pragmatis maupun ideologis. 3) Mengevaluasi potensi tantangan dan implikasi jangka panjang dari strategi koalisi ini terhadap keberadaan dan daya tawar politik Islam di tingkat lokal.

Banyak penelitian telah dilakukan tentang politik lokal di Medan. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada dampak politik identitas dalam Pilkada 2020, menyoroti pasangan Akhyar-Salman ([Aminah et al., 2023](#)). Studi lain telah meneliti dinamika populisme Islam dalam konteks politik nasional pasca-reformasi, yang juga telah mempengaruhi konstelasi politik lokal ([Atikah et al., 2025](#)). Studi ini memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana identitas dan ideologi berfungsi dalam pemilu.

Studi sebelumnya cenderung retrospektif, berfokus pada pemilu 2020, atau terlalu luas dalam lingkup nasionalnya. Penelitian tentang politik identitas di daerah multikultural seringkali bersifat umum dan tidak secara spesifik menganalisis dilema strategis yang dihadapi partai-partai Islam ([Doa, 2025](#)). Selain itu, studi tentang politisasi agama yang konsisten menjelang pemilu 2024 sebagian besar berfokus pada tingkat nasional ([Achfandhy et al., 2024](#)). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengambil pendekatan prospektif (berwawasan ke depan) terhadap proses pengambilan keputusan strategis pihak-pihak Islam menjelang Medan Pilkada 2024. Ini secara khusus menganalisis ketegangan antara pragmatisme koalisi dan urgensi mempertahankan basis ideologis di tingkat kota.

Argumen sementara yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa partai politik Islam di Medan Pilkada 2024 akan cenderung melanjutkan strategi pembentukan koalisi pragmatis dengan partai nasionalis. Opsi tersebut merupakan respons rasional terhadap fragmentasi kekuasaan politik dan dominasi politik berbasis kepribadian. Namun, strategi ini secara bersamaan akan mempercepat erosi basis ideologis mereka dan mengancam relevansi jangka panjang mereka. Jika tidak diimbangi dengan strategi yang kuat untuk pengembangan kader dan perekrutan politik untuk melawan tren dinasti politik,

partai-partai Islam berisiko terjebak dalam politik elit oligarki dan kehilangan ciri pembeda utama mereka di mata pemilih.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain keseluruhan ini dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena kompleks dinamika koalisi politik (Fadhli, 2021). Untuk mendapatkan data otentik, penelitian ini diimplementasikan sebagai penelitian lapangan, di mana peneliti mengumpulkan data langsung dari subjek dalam lingkungan alaminya untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang suatu peristiwa (Elitear et al., 2016).

Proses penelitian dimulai dengan tahap pengumpulan data, yang memanfaatkan beragam teknik seperti wawancara mendalam dengan aktor politik, observasi non-partisipan, dan analisis dokumenter untuk memastikan data yang dikumpulkan komprehensif (Jailani, 2023). Setelah data dikumpulkan, proses analisis data kualitatif dilakukan, yang mencakup tiga alur kegiatan secara simultan: pengurangan data (meringkas dan memfokuskan), tampilan data (mengatur informasi), dan penarikan atau verifikasi kesimpulan (Sarosa, 2021). Untuk menguji validitas temuan, peneliti juga menerapkan teknik triangulasi untuk memastikan kredibilitas data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu tantangan utama bagi penguatan demokrasi lokal di Indonesia. Khususnya, peran strategis partai politik Islam, selama ini menjadi aktor penting dalam peta politik nasional dan lokal, mengalami pergeseran signifikan yang berdampak pada dinamika politik di Kota Medan. Penurunan partisipasi politik masyarakat dan perubahan pola koalisi partai yang kian pragmatis berpotensi mencerminkan masalah struktural dalam mekanisme demokrasi setempat.

Secara konseptual, masa depan dan keberadaan partai politik Islam di Medan terkait erat dengan dinamika politik identitas. Partai-partai Islam seperti PKS dan PPP didefinisikan oleh landasan agama-ideologis mereka, namun dalam praktiknya, mereka harus beroperasi di arena politik yang penuh dengan penggunaan sentimen berbasis identitas untuk mobilisasi massa (Aminah et al., 2023; Erinaldi, 2024). Hal ini menciptakan ketegangan di mana partai-partai ini

harus mempertahankan basis ideologis mereka untuk mempertahankan konstituen inti sementara secara bersamaan bertindak pragmatis untuk membentuk koalisi lintas ideologi agar tetap relevan secara elektoral (Atikah et al., 2025). Akibatnya, relevansi partai-partai Islam tidak lagi diukur semata-mata dengan kemenangan, tetapi dengan kemampuan mereka untuk menerjemahkan ideologi menjadi solusi untuk isu-isu nasional yang lebih luas dalam masyarakat yang heterogen.

Konteks pemilu lokal sendiri didominasi oleh pragmatisme koalisi dan sistem rekrutmen politik yang cacat. Koalisi sering dibentuk berdasarkan kalkulus elektoral jangka pendek daripada visi bersama (Ekowati, 2019; Gunawan et al., 2020). Fenomena ini diperburuk oleh proses rekrutmen kandidat yang sering dikendalikan oleh kepentingan elit dan oligarki, yang mengabaikan kompetensi dan akuntabilitas (Faedlulloh et al., 2023; Fitriyah, 2020). Kombinasi koalisi transaksional dan kandidat yang tidak memenuhi syarat ini pada akhirnya menciptakan siklus apatis pemilih, dibuktikan dengan rendahnya jumlah pemilih dalam pemilu Medan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik.

Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran peran strategis partai politik Islam dalam lanskap politik Kota Medan. Meski memiliki basis pemilih yang solid tercermin dari 15,00% suara yang diperoleh PKS pada Pilkada 2024, partai Islam tidak mampu mengubah kekuatan ini untuk mengamankan posisi eksekutif tertinggi. Mereka cenderung menempati peran sebagai penentu koalisi atau "pembuat raja", daripada pemenang utama.

"Kami sangat menyadari bahwa suara masyarakat di Medan sangat signifikan. Tanpa kita, koalisi mana pun akan merasa sulit untuk menang. Namun untuk berlari untuk posisi nomor satu, perhitungannya masih sulit. Kenyataannya adalah, kita melayani sebagai penyeimbang dan penentu; Posisi tawar kami kuat dalam hal itu, tetapi memimpin secara langsung tetap menjadi tantangan." (Informan 1, kader senior partai Islam).

Keberhasilan dalam kontes elektoral tidak lagi semata-mata ditentukan oleh loyalitas ideologis tetapi oleh kemampuan untuk membangun aliansi strategis. Dominasi partai-partai nasionalis, yang memiliki sumber daya yang lebih besar, memaksa partai-partai Islam untuk mengambil peran pendukung dalam koalisi pragmatis. Kemenangan calon yang didukung oleh koalisi besar di Pilkada Medan

2024, sementara calon PKS hanya meraih 19% suara, menjadi bukti empiris pergeseran peran ini.

Hasil penelitian mengungkap bahwa dinamika pembentukan koalisi di Pilkada Medan sangat dipengaruhi oleh pragmatisme elektoral yang mengesampingkan afinitas ideologis. Partai-partai politik, termasuk partai Islam, memprioritaskan perhitungan kemenangan dan pembagian kekuasaan daripada membangun aliansi berdasarkan platform program bersama.

"Ideologi penting untuk identitas, tetapi di lapangan, politik adalah seni yang mungkin. Siapa yang memiliki peluang terbesar untuk menang? Dengan siapa kita dapat bekerja sama untuk mengamankan sumber daya? Itulah pertimbangan utamanya. Jika kita terlalu kaku dengan ideologi, kita mungkin tidak dapat bersaing sama sekali." (Informan 1, kader senior partai Islam).

Lebih lanjut, ditemukan bahwa pragmatisme ini berdampak langsung pada sistem rekrutmen politik yang cacat. Proses pencalonan telah menjadi sarat dengan kepentingan elit partai, di mana partai-partai cenderung berfungsi hanya sebagai "kendaraan politik". Akibatnya, kandidat yang didukung seringkali tidak dipilih berdasarkan kompetensi atau rekam jejak, melainkan pada popularitas, kekuatan finansial, atau kedekatan dengan elit.

"Dalam setiap pilkada daerah, kita sebagai masyarakat sipil melihat pola yang sama. Orang-orang yang muncul selalu wajah yang sama, atau orang yang punya uang. Partai-partai tidak serius tentang pengembangan kader. Prosesnya buram, dan nepotisme masih marak. Jadi, wajar jika publik menjadi semakin apatis karena merasa tidak ada pilihan yang benar-benar mumpuni." (Informan 2, Aktivis Masyarakat Sipil).

Manifestasi dari rekrutmen yang buruk ini adalah munculnya kandidat yang tidak mampu meyakinkan publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses demokrasi secara keseluruhan.

Selain itu, temuan dari lapangan menunjukkan bahwa kombinasi pragmatisme elit dan rekrutmen politik yang tidak bertanggung jawab menjadi akar penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Kota Medan. Data historis mengungkapkan tren partisipasi yang tidak pernah melampaui 60%, bahkan anjlok menjadi 25,38% pada Pemilu 2015. Fenomena ini bukan semata-mata

keengganan memilih tetapi bentuk apatis total yang berasal dari krisis kepercayaan.

"Masyarakat Medan lelah. Mereka melihat infrastruktur tidak membaik, korupsi terus berlanjut, dan kandidat yang ditawarkan partai dalam setiap pemilu tidak memberikan harapan baru. Jadi, pertanyaan mereka sederhana: 'Mengapa saya harus memilih jika tidak ada yang akan berubah?' Partisipasi yang rendah ini adalah bentuk protes diam-diam." (Informan 3, Analisis Politik Lokal).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa euforia Pilkada di tingkat elit tidak berbanding lurus dengan keterlibatan publik. Jumlah memilih yang rendah ini merupakan indikator kuat dari masalah struktural dalam demokrasi lokal: erosi kepercayaan publik. Fenomena ini, bersama dengan dinamika lain yang terungkap dalam penelitian, menyatu menjadi empat tema utama: Pergeseran peran strategis partai politik Islam sebagai kingmaker koalisi; Dominasi pragmatisme yang mengarah pada krisis perekrutan politik; Siklus apatis publik yang dihasilkan dari krisis kepercayaan; dan Tantangan bagi partai-partai Islam untuk beradaptasi untuk menjaga relevansinya di masa depan.

Pergeseran Peran Strategis Partai-partai Islam sebagai Kingmaker Koalisi

Analisis penelitian mengungkapkan bagaimana peran strategis partai politik Islam telah bergeser secara signifikan. Partai-partai Islam sekarang memainkan peran sebagai pembuat raja koalisi; posisi yang mendefinisikan mereka sebagai aktor politik yang, meskipun tidak cukup kuat untuk menang secara independen, memegang posisi tawar-menawar penting untuk menentukan kemenangan koalisi yang lebih besar. Peran ini jelas diwujudkan dalam Medan Pilkada 2024, di mana partai-partai Islam menunjukkan kemampuannya menjadi komponen vital yang suaranya diperebutkan oleh koalisi partai-partai nasionalis.

Peran konstelasi mengkategorikan kembali kekuatan partai-partai Islam bukan dengan kemampuan mereka untuk memimpin, tetapi oleh kapasitas mereka untuk berintegrasi ke dalam strategi koalisi pemenang yang lebih besar, di mana aliansi strategis adalah kuncinya (Gunawan et al., 2020). Fenomena ini menegaskan bahwa partai-partai Islam memilih posisi kingmaker untuk mempertahankan relevansi mereka dalam lanskap politik yang terfragmentasi.

Dominasi Pragmatisme dan Dampaknya terhadap Krisis Perekrutan Politik

Penelitian menganalisis dominasi pragmatisme politik secara langsung memicu krisis rekrutmen. Pragmatisme politik mengacu pada orientasi tindakan yang memprioritaskan perhitungan elektoral dan kepentingan jangka pendek daripada konsistensi ideologis (Ekowati, 2019). Hal ini diwujudkan dalam prevalensi koalisi lintas ideologi yang cenderung beroperasi secara transaksional. Pragmatisme ini kemudian menimbulkan krisis dalam fungsi rekrutmen politik, di mana partai-partai gagal memilih dan menghadirkan kader terbaik mereka. Sebaliknya, proses rekrutmen beroperasi secara oligarki dan nepotistik, mendorong kebangkitan dinasti politik dan kandidat yang lebih mengandalkan kekuatan finansial daripada kompetensi (Fitriyah, 2020; Maydani et al., 2024). Akibatnya, partai politik hanya berfungsi sebagai "kendaraan politik" yang melegitimasi kandidat tanpa menjalani proses seleksi demokratis, yang pada gilirannya memperkuat cengkeraman elit terhadap politik lokal (Faedlulloh et al., 2023).

Siklus Apatitis Publik dan Rendahnya Partisipasi Pemilih

Pembentukan siklus apatis publik yang dipicu oleh krisis kepercayaan. Siklus ini mendefinisikan sikap ketidakpedulian publik terhadap proses politik, yang berasal dari keyakinan bahwa partisipasi mereka tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Manifestasi dalam bentuk partisipasi pemilih yang rendah secara konsisten dalam pilkada Kota Medan, dengan data menunjukkan penurunan drastis yang pernah mencapai level 25,38%. Penyebabnya berakar kuat pada masalah struktural: publik telah kehilangan kepercayaan pada partai politik dan pemerintah karena perekrutan kandidat yang buruk, korupsi yang merajalela, dan kegagalan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, partisipasi yang rendah ini mencerminkan respons rasional dari publik yang kecewa yang tidak lagi memandang pemilu sebagai mekanisme yang efektif untuk menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik (PAG & Mbiri, 2025).

Tantangan Adaptif bagi Partai Islam untuk Menjaga Relevansi Masa Depan

Tantangan adaptif yang dihadapi partai politik Islam untuk kelangsungan hidup mereka. Adaptasi di sini didefinisikan sebagai kemampuan sebuah partai untuk memodernisasi strateginya, memperluas basis pemilihnya, dan merumuskan agenda politik yang relevan dengan tantangan kontemporer. Tantangan ini diwujudkan dalam kenyataan bahwa partai-partai Islam harus

bersaing di tengah dominasi partai-partai nasionalis dan menghadapi sikap apatis pemilih muda perkotaan. Untuk mengatasi hal tersebut, partai-partai Islam dituntut untuk mengadopsi beberapa strategi krusial: pertama, memodernisasi komunikasi politik mereka dengan memanfaatkan media digital; kedua, untuk memperkuat pengembangan kader dan sistem rekrutmen mereka untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas (Fitriyah, 2020); dan ketiga, untuk menunjukkan kemampuan membangun koalisi inklusif sambil mempertahankan identitas ideologis mereka. Pada akhirnya, relevansi masa depan partai-partai Islam akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengubah diri mereka dari sekadar mewakili politik identitas menjadi kekuatan politik yang menawarkan solusi konkret untuk masalah publik (Atikah et al., 2025).

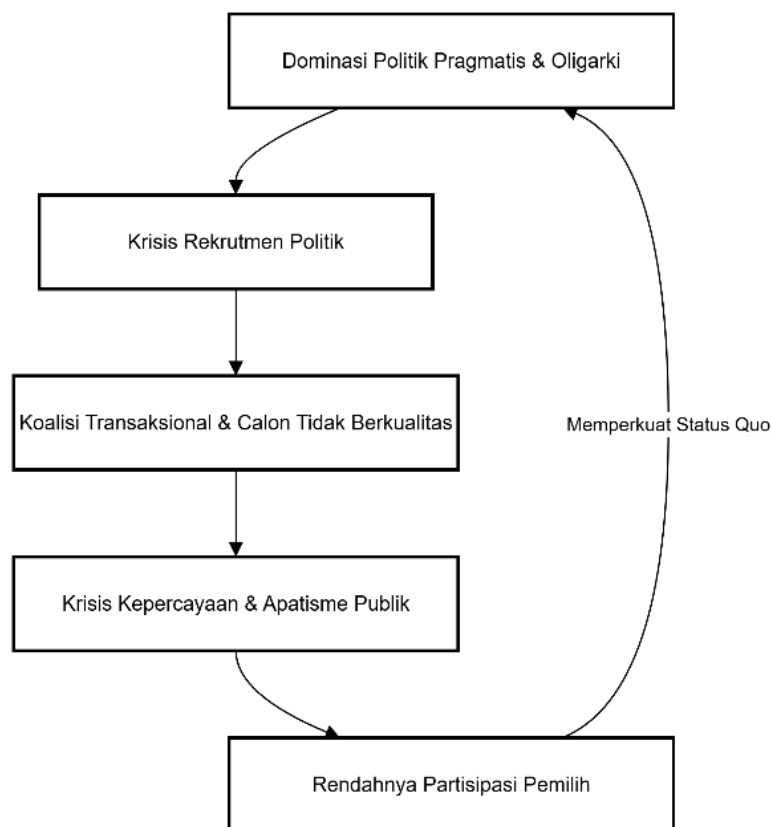
Partai politik Islam di Medan kini memainkan peran strategis sebagai kingmaker, bukan menjadi pesaing utama. Peran ini muncul dari perlunya membentuk koalisi pragmatis yang mengutamakan perhitungan elektoral daripada keselarasan ideologis (Ekowati, 2019). Dominasi pragmatisme ini secara langsung memicu krisis perekrutan politik, di mana kepentingan elit oligarki terbukti mengesampingkan pemilihan kandidat yang memenuhi syarat (Faedlulloh et al., 2023; Fitriyah, 2020). Temuan utama dari penelitian ini adalah bagaimana koalisi transaksional dan proses rekrutmen yang cacat ini menciptakan siklus yang saling memperkuat yang mengikis kepercayaan publik.

Konsekuensi logis dari fenomena tersebut munculnya apatis publik kronis, yang tercermin dalam jumlah pemilih yang sangat rendah, yang menandakan krisis kepercayaan yang mendalam. Akar masalahnya adalah struktural: sistem politik lokal lebih dikendalikan oleh kepentingan oligarki (Adhianugrah & Zainul, 2023; Nge, 2018) daripada aspirasi publik. Tanpa reformasi mendasar dalam struktur internal partai, fenomena "dangkal demokrasi" ini diprediksi akan terus berlanjut dan akan menjadi tantangan utama bagi masa depan politik di Kota Medan.

Praktik politik di Pilkada Medan terjebak dalam siklus pragmatisme koalisi, krisis rekrutmen, dan apatis publik. Berdasarkan temuan tersebut, tindakan prioritas yang diperlukan tidak hanya elektoral, tetapi struktural dan fundamental. Jalan ideal ke depan bagi partai politik, khususnya partai Islam, adalah melakukan reformasi internal yang serius, yang terdiri dari dua tahap prioritas. Pertama, membangun sistem rekrutmen politik yang terbuka, meritokratis, dan akuntabel untuk menghentikan praktik nepotisme dan nominasi berbasis transaksi. Kedua, memodernisasi strategi komunikasi politik untuk

menjangkau pemilih kritis dan menawarkan solusi konkret atas masalah publik, daripada hanya mengandalkan mobilisasi berbasis identitas. Tanpa reformasi internal partai yang mendasar ini, sistem demokrasi lokal hanya akan terus menghasilkan pemimpin yang tidak representatif dan krisis kepercayaan publik yang semakin dalam.

Penelitian Ekowati (2019) mengungkapkan bahwa pragmatisme telah menjadi logika dominan, mengesampingkan ideologi dalam pembentukan koalisi Pilkada. Temuan di Medan memberikan bukti empiris yang kuat untuk argumen ini. Selanjutnya, penelitian ini menguraikan temuan Fitriyah (2020) dan Nge (2018) mengenai rekrutmen yang cacat akibat dinasti dan oligarki. Sementara studi tersebut berfokus pada proses internal partai, penelitian ini secara eksplisit menunjukkan dampak eksternal: bagaimana produk dari perekrutan yang cacat ini menjadi penyebab utama apatis publik di lapangan. Tidak seperti penelitian lain yang cenderung parsial, kebaruan dari temuan ini adalah demonstrasi hubungan kausal antara pragmatisme koalisi, krisis perekrutan, dan apatis pemilih sebagai siklus yang melanggengkan diri.



Gambar 1. Siklus Kausal Erosi Demokrasi Lokal di Kota Medan

Gambar 1 menyajikan model konseptual berupa siklus erosi demokrasi yang melanggengkan diri. Orientasi jangka panjang dari model ini bukanlah kemajuan demokratis, tetapi pelestarian kekuasaan elit melalui sikap apatis publik. Konsep ini menjelaskan bahwa dinamika politik di Medan bukanlah serangkaian peristiwa acak, melainkan sistem yang saling terkait.

Interaksi antara fungsi manajerial pragmatis partai (seperti rekrutmen dan koalisi) dan respons publik yang apatis telah membentuk budaya politik di mana partisipasi menurun sementara kontrol elit menguat. Model ini menegaskan bahwa masalah utama demokrasi lokal bukan semata-mata hasil pemilu, tetapi proses sistemik yang terjadi jauh sebelum hari pemungutan suara.

Untuk memahami model siklus ini, temuan penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori faktor yang berinteraksi: faktor elit dan faktor publik. (Kategorisasi). Faktor elit antara lain dominasi pragmatisme dalam membentuk koalisi yang mengabaikan ideologi (sejalan dengan [Ekowati, 2019](#)) dan krisis rekrutmen yang dikendalikan oleh kepentingan oligarki (memperkuat temuan [Nge, 2018 & Fitriyah, 2020](#)).

Faktor publik adalah respon logis dari apatis dan partisipasi yang rendah, yang merupakan manifestasi dari krisis kepercayaan (sejalan dengan kerangka evaluasi partisipasi oleh [PAG & Mbiri, 2025](#)). (Penjelasan). Akibatnya, analisis menunjukkan bahwa kedua kategori faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi ada dalam hubungan kausal yang merusak. Tindakan elit politik secara langsung menghasilkan reaksi apatis publik, dan sikap apatis ini, pada gilirannya, memberikan ruang bagi elit untuk tetap berkuasa tanpa pertanggungjawaban.

Penelitian berimplikasi bahwa setiap upaya untuk meningkatkan demokrasi lokal akan gagal jika hanya parsial. Mengingat masalahnya adalah siklus sistemik, solusinya juga harus komprehensif, menargetkan beberapa titik secara bersamaan. Rekomendasi utama adalah reformasi mendasar dari sistem rekrutmen internal partai politik untuk memutus rantai kandidat berkualitas rendah. Namun, hal ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan literasi politik kritis di tingkat masyarakat untuk mengubah sikap apatis menjadi tekanan publik yang konstruktif. Tanpa pendekatan ganda yang menargetkan perilaku elit dan kesadaran publik secara bersamaan, setiap upaya reformasi hanya akan menjadi formalitas dan tidak akan dapat membongkar siklus erosi demokrasi yang mengakar.

Implikasi sosial penelitian terhadap konteks demokrasi lokal. Rendahnya partisipasi pemilih dan dominasi politik pragmatis menciptakan siklus yang

secara sistematis mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik. Siklus erosi demokrasi ini tidak hanya memperkuat dominasi elit dan mengurangi akuntabilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan apatisme politik yang meluas di masyarakat. Kondisi seperti ini dapat memperlemah peran warga dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga menghambat pembangunan sosial dan demokratisasi yang inklusif. Oleh karena itu, intervensi yang menyeluruh dan reformasi mendalam dalam mekanisme perekrutan politisi menjadi sangat penting demi memperbaiki kualitas demokrasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam sistem politik.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi adanya siklus erosi demokrasi di Kota Medan yang ditandai oleh rendahnya partisipasi pemilih dan pergeseran peran strategis partai politik Islam yang dipengaruhi oleh pragmatisme koalisi dan krisis perekrutan politik. Siklus ini secara sistematis mengikis kepercayaan publik, memperkuat dominasi elit, serta melanggengkan politik oligarki dan koalisi transaksional dengan kualitas kandidat yang rendah. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa perbaikan demokrasi lokal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan reformasi komprehensif, khususnya pada sistem perekrutan internal partai politik. Dengan demikian, intervensi yang tepat dan holistik diharapkan mampu memutus siklus negatif tersebut, meningkatkan kualitas kandidat, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

BIBLIOGRAFI

- Achfandhy, M. I., Pujiyanto, W. T., Daniyarti, W. D., & Jamiah, R. (2024). Pra-Pilpres 2024: Mengungkap Konsistensi Politisasi Agama. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(1), 67–84. <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17103>
- Adhianugrah, M. A., & Zainul. (2023). Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 380–391. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.178>
- Aminah, A., Harahap, F. G., Hasan, E., Muliawati, M., & Ubaidullah, U. (2023). Dampak Politik Identitas pada Pilkada (Studi Kasus Politik Identitas Pasangan Akhyar-Salman pada Pilkada 2020 di Kota Medan). *Komunitas: Pengawas Dinamika Sosial*, 8(2), 245–257. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i2.5719>
- Atikah, P., Muary, R., & Pohan, R. (2025). Dinamika Populisme Islam Pasca Reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 278–293. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.22191>

- Efriza, E., Randisa, AR, Lestari, A., & Hanif, FA (2024). Analisis Dinamika Koalisi Menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. *Ilmu dan Budaya*, 45(2), 117–126. <https://doi.org/10.47313/jidb.v45i2.3873>
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16–37. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2>
- Elitear, FMJ, Tambunan, A., & Koto, E. (2016). *Penelitian Lapangan (Penelitian Lapangan)*. Naskah yang tidak diterbitkan atau diterbitkan sendiri.
- Erinaldi, E. (2024). Politik Identitas dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 1–13. <https://doi.org/10.59050/jian.v21i2.244>
- Fadhli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faedlulloh, D., Sulistiowati, R., Apandi, A., & Karmilasari, V. (2023). Oligarki dan Politik Elit dalam Pemilu Lokal 2020: Tinjauan Singkat. *Jurnal Masalah Politik*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.113-248>
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Gunawan, G., Bainus, A., & Paskarina, C. (2020). Strategi Koalisi Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional dalam Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah: Studi Kasus Kemenangan Pasangan Jamin Idham dan Chalidin pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(1), 51–68. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i1.1826>
- Holilah, H., & Khaq, Z. (2024). Implikasi Koalisi Partai pada Proses Pembentukan Kebijakan di Daerah (Studi di Pilkada Bangkalan Tahun 2018). *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 29–48. <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i1.17565>
- Jailani, MS (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Maydani, R., Husna, M. F., Winarti, S. L., Harahap, N., & Ardiansyah, A. (2024). Politik Dinasti di Negara Demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 950–955. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1075>
- Nge, HJ (2018). Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. *Jurnal Academia Praja*, 1(1), 59–84. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.42>
- Doa, A. (2025). Politik Identitas dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilihan Umum di Daerah Multikultural. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 89–94. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.182>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius.,
- PAG, & Mbiri, ADJ AB (2025). Evaluasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Serentak

Tahun 2024 di Kabupaten Belu. *Moderator: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 475–489. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i2.4810>